

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXVIII/November - 2018

08 | Sekretariat Penanggulangan
Bencana Kemendikbud
Tim Gerak Cepat Penanganan
Bencana

13 | Bahu-membahu Pulihkan
Layanan Pendidikan di
Sulawesi Tengah

20 | Pendidikan Tanggap Bencana
Minimalkan Risiko Bencana
Melalui Program SPAB



Siswa Harus
Tetap Bersekolah

PERAIH PENGHARGAAN EMAS
SAMPUL TERBAIK KATEGORI
E-MAGAZINE GOVERNMENT SPS


InMA
INDONESIA INHOUSE MAGAZINE
AWARDS 2018

JUARA KETIGA
ICMA 2018
KATEGORI
GOVERNMENT INSTITUTION

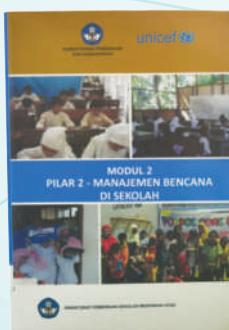

ICMA 2018
INDONESIA CONTENT
MARKETING AWARDS

Daftar Isi

4 Salam Pak Menteri fokus



22 Resensi Buku
**Siapkan Warga
Sekolah Hadapi dan
Tanggulangi Bencana**



06 Bangkit Pascabencana
Siswa Harus Tetap Bersekolah

10 Reaksi Cepat Tanggap
Kemendikbud
**Dukung Percepatan Pemulihan
Pascabencana di NTB**

16 Layanan Dampingan Psikososial
**Ajak Masyarakat Lepaskan
Rasa Cemas Pascabencana**

18 37 Ribu Lebih Sekolah
Ada di Wilayah Risiko Tinggi
Bencana Alam

20 Pendidikan Tanggap Bencana
**Minimalkan Risiko Bencana
Melalui Program SPAB**

24 Kongres Kebudayaan
Indonesia 2018
**Rumuskan Strategi
untuk Tata dan Kelola
Kebudayaan Indonesia**

28 Strategi Pembelajaran di
Daerah Rawan Bencana
**Lewat Permainan
Tradisional,
Siswa Terbantu Pahami
Materi Kebencanaan**

32 Kongres Bahasa
Indonesia XI
**Momentum
Penegakan
Bahasa Negara**

34 Bangga Berbahasa
Indonesia
**Perjalanan
Kongres Bahasa
Indonesia (KBI)**

Sapa Redaksi

BENCANA alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah pada medio tahun 2018 berdampak sangat luar biasa. Sebanyak lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, ribuan bangunan sekolah rusak, dan puluhan ribu orang mengungsi. Respons cepat pascabencana dilakukan agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera bergerak ke daerah terdampak. Di sini, Kemendikbud mendirikan pos pendidikan untuk melakukan pendataan, penyaluran bantuan, serta penanganan bencana lainnya di bidang pendidikan. Pos pendidikan ini juga berfungsi untuk menjembatani koordinasi multipihak sehingga penanganan korban pascabencana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Upaya Kemendikbud membantu korban bencana ini dilakukan agar pendidikan di daerah terdampak bencana dapat segera pulih sehingga siswa dapat kembali bersekolah. Tidak hanya bantuan pembangunan kelas darurat berupa tenda sesuai standar UNICEF, Kemendikbud juga membagikan perlengkapan sekolah serta pelayanan psikososial dan psikoedukasi kepada warga sekolah. Bantuan senilai lebih dari Rp 500 miliar digulirkan Kemendikbud untuk penanganan pascabencana di dua provinsi tersebut.

Ya, topik kali ini redaksi hadirkan bagi pembaca setia *JENDELA* untuk memberikan gambaran kebijakan yang dilakukan Kemendikbud agar pendidikan yang menjadi hak anak dapat terpenuhi. Sajian dalam rubrik **Fokus** tersebut kami sajikan sebanyak 16 halaman yang diperkaya dengan infografis berisi data-data terkait penanganan bencana yang Kemendikbud dan

sejumlah pihak terkait kerjakan.

Pada rubrik **Resensi Buku**, kami tampilkan ulasan singkat mengenai modul pembelajaran berjudul "Manajemen Bencana di Sekolah". Modul ini membantu memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang peduli dan tertarik untuk berperan aktif dalam setiap fase bencana terutama untuk mempersiapkan penanggulangan dan kesiagaan bencana di sekolah. Modul ini memuat langkah-langkah utama dalam mempersiapkan kesiagaan bencana, sehingga cocok digunakan oleh guru dalam pembelajaran.

Masih mengenai topik kebencanaan, di rubrik **Kajian**, redaksi ulas mengenai penelitian tentang strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui permainan tradisional untuk siswa di daerah rawan bencana. Penelitian dilakukan pada siswa dan guru di Sekolah Dasar (SD) Puncak Manis serta pemuka masyarakat di Kedungpi, Sukabumi, Jawa Barat.

Tidak ketinggalan, pada edisi ini juga redaksi senantiasa menghadirkan rubrik tetap, yaitu **Kebudayaan dan Bangga Berbahasa Indonesia**. Pada kedua rubrik ini, *JENDELA* tampilkan tentang kongres kebudayaan dan kongres bahasa Indonesia yang merupakan kegiatan lima tahunan untuk menyusun strategi demi perkembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Redaksi berharap seluruh sajian yang kami tampilkan di edisi kali ini kembali memberikan manfaat bagi pembaca setia. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhamdijir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pimpinan Redaksi: Luluk Budiyono

Redaktur Pelaksana: Emi Salipati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Desliana Maulipaksi,
Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Prima Sari,
Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



Kemendikbud.go.id

Kemendikbud.RI

@kemendikbud_RI

KEMENDIKBUD RI

Kemendikbud.RI

jendela.kemendikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Kita semua berduka saat bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka tidak saja kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan tempat bagi anak-anak untuk menimba ilmu di sekolah. Banyak ruang kelas rusak, bahkan tidak sedikit dalam kondisi hancur, rata dengan tanah. Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti itu berlangsung terlalu lama. Hak anak-anak memerlukan pendidikan harus terus berjalan.

Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat. Anak-anak, para guru dan tenaga kependidikan, tidak boleh terlalu lama menderita. Kita harus segera bangkit kembali. Pendidikan tidak boleh terlalu lama terhenti.

Saya sudah minta kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unit terdekat di daerah untuk terjun ke lapangan memeriksa kondisi satuan pendidikan terdampak bencana. Dari hasil tinjauan itu, Kemendikbud bersama pihak-pihak lainnya bergerak cepat menanggulangi dampak bencana khususnya di bidang pendidikan.

Sejumlah dana bantuan pun digulirkan untuk membangun tenda yang digunakan sebagai ruang kelas darurat agar proses pembelajaran siswa tetap berlangsung. Tak hanya itu, bantuan perlengkapan sekolah, kebutuhan pokok, dan lainnya pun didistribusikan ke daerah-daerah terdampak bencana tersebut.

Strategi pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di daerah terdampak bencana disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui permainan, psikoedukasi, dan psikososial dengan memaksimalkan penggunaan media-media pendidikan yang ada baik di dalam atau luar ruang kelas.

Selain itu, Kemendikbud juga melakukan penanganan psikososial anak, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memulihkan trauma yang dialami mereka serta melakukan kampanye Gerakan Kembali Sekolah. Pemberian beasiswa





bagi siswa serta pemenuhan tunjangan guru dan tenaga kependidikan bagi korban terdampak bencana segera Kemendikbud tuntaskan.

Adapun rencana jangka panjang yang akan dilakukan demi pulihnya kembali layanan pendidikan di daerah-daerah terdampak bencana di antaranya rehab sekolah, pendirian unit sekolah baru, dan lainnya. Hal itu juga tentunya disesuaikan dengan penerapan kebijakan zonasi sekolah yang telah Kemendikbud terbitkan sebelumnya.

Perbaikan-perbaikan itu tentunya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tentu perlu pelibatan publik agar pemulihan

pascabencana di berbagai wilayah terdampak bencana dapat segera rampung dan anak-anak dapat menikmati kembali layanan pendidikan yang menjadi haknya dengan sangat layak.

Saya percaya, budaya gotong royong di seluruh lapisan masyarakat Indonesia membuat kita mampu mengatasi, memulihkan, dan mempercepat terwujudnya hal tersebut.

Saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Saya rasa ini baik sekali dalam rangka membangun solidaritas, gotong royong. Ini menjadi bagian dari pendidikan karakter. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoinya. Amin YRA. (*)

Bangkit Pascabencana

Siswa Harus Tetap Bersekolah

Serentetan gempa dashyat dan tsunami menerpa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), beberapa waktu lalu. Hal itu membuat proses pendidikan di daerah terdampak bencana sempat terhenti tetapi kondisi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Siswa harus tetap bersekolah, meskipun dalam keterbatasan sarana prasarana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama sejumlah pihak mengerahkan segenap upaya agar siswa terdampak bencana tetap dapat menikmati layanan pendidikan.

KABAR MENGENAI gempa berkekuatan 6,4 skala Richter (SK) yang mengguncang Lombok, NTB, pada 29 Juli 2018 membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhamdijir Effendy langsung memerintahkan jajarannya di daerah untuk mengecek kondisi sekolah. Ia khawatir bangunan sekolah mengalami kerusakan hingga dapat menghambat proses belajar mengajar.

Benar saja. Mendikbud Muhamdijir menerima laporan bahwa ada lima bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Lantas ia menurunkan tim untuk menyiapkan tenda sebagai pengganti ruang kelas sementara beserta perlengkapan sekolah agar pembelajaran siswa tetap berlangsung.

Tindakan yang sama juga dilakukan saat sepekan berikutnya terjadi gempa berkekuatan 7 skala Richter dan menyebabkan ratusan bangunan sekolah rusak berat. Sehari pascagempa, Kemendikbud bersama sejumlah pihak bergegas turun ke lapangan untuk melihat dampaknya dan menyalurkan bantuan yang diperlukan. Pada lain kesempatan, Mendikbud Muhamdijir beberapa kali juga ikut dalam rombongan untuk meninjau sejumlah sekolah terdampak gempa serta mengunjungi para korban.

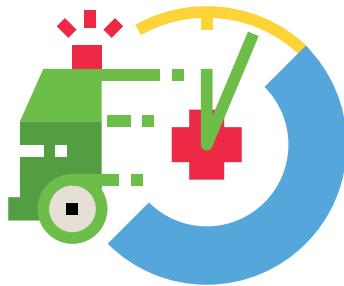
Upaya Kemendikbud menanggulangi

bencana di Lombok ini dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya menggulirkan bantuan senilai lebih dari Rp200 miliar agar digunakan untuk membangun tenda sebagai ruang kelas sementara dan lainnya. Selain itu, Kemendikbud juga melakukan penanganan psikososial anak, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memulihkan trauma yang dialami korban serta melakukan kampanye kembali belajar di sekolah.

Di lokasi terjadinya gempa, Kemendikbud mendirikan pos pendidikan yang digunakan untuk mendistribusikan berbagai bantuan pemenuhan layanan dasar para korban terdampak gempa. Di pos itu pula dilakukan pengkajian kerusakan dan kebutuhan penanganan pascagempa sehingga pemberian bantuan dapat relevan dengan kebutuhan para korban.

Sementara itu pascagempa hebat berkekuatan 7,7 skala Richter di Sulteng pada 28 September 2018, Kemendikbud langsung berkoordinasi dengan tim perintis penanganan bencana setempat untuk mendapatkan perkembangan kondisi fasilitas pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta menentukan titik-titik strategis penyerahan bantuan.

Gerak cepat penanganan pascagempa dan tsunami dilakukan agar dapat segera memulihkan kondisi Sulteng, terutama di bidang pendidikan.



Bentuk Penanganan Pascabencana oleh Kemendikbud, antara lain:

1. Pendirian tenda sebagai ruang kelas darurat/segmentara
2. Pengiriman tim untuk pelayanan psikososial, psikoedukasi, dan pemuliharaan trauma
3. Rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang rusak pascabencana
4. Pemberian tunjangan khusus bagi guru yang menjadi korban
5. Bantuan logistik berupa makanan, perlengkapan kebutuhan dasar, pakaian bersih, peralatan sekolah
6. Pendataan jenis bantuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan
7. Pemberian beasiswa berupa bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) khusus bencana
8. Bantuan di bidang kebudayaan, antara lain menggelar kegiatan Nusantara Art Festival, permainan tradisional, penguatan pendidikan karakter melalui media inspiratif, bantuan pemerintah untuk komunitas sejarah, pemugaran cagar budaya, dan penyelamatan koleksi museum di Palu.



(Sumber: Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud)

Kegiatan belajar tidak boleh terlalu lama berhenti. Untuk itu kelas-kelas darurat disiapkan bersama dengan para relawan, lembaga masyarakat, dan pihak lainnya. Mendikbud juga mengimbau masyarakat di luar provinsi Sulteng dan daerah sekitarnya agar berlomba-lomba untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak terdampak bencana.

Bentuk Sekretariat Penanggulangan Bencana

Keseriusan Kemendikbud dalam penanganan daerah terdampak gempa tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penyaluran bantuan maupun pengiriman relawan. Bentuk keseriusan lain yang

dilakukan adalah terbitnya Keputusan Mendikbud (Kepmen) Nomor 234/P/2018 tentang Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud.

Kepmen ini memperbarui struktur sekretariat penanggulangan bencana yang sebelumnya tertuang dalam Kepmendikbud Nomor 40/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbud. Alasannya agar dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit utama di Kemendikbud, lintas kementerian/lembaga terkait, dan organisasi nonpemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. (RAN)

Kegiatan belajar tidak boleh terlalu lama berhenti. Untuk itu kelas-kelas darurat disiapkan dengan para relawan, lembaga masyarakat, dan pihak lainnya.

Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud

Tim Gerak Cepat Penanganan Bencana

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia dilanda berbagai macam bencana dengan jumlah korban jiwa yang banyak serta kerugian materiel yang tidak sedikit, termasuk di bidang pendidikan. Pemulihan bencana di daerah terdampak bencana ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, perlu libatkan publik agar lebih cepat.

Seluruh pihak perlu bergerak cepat dan bahu-membahu menanggulangi pemulihan layanan pendidikan yang terdampak bencana.

EFEKTIVITAS PELIBATAN publik, lintas kementerian/lembaga, dan organisasi nonpemerintah serta berbagai satuan kerja di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pemulihan layanan pendidikan yang terdampak bencana perlu ditingkatkan. Kemendikbud melalui Keputusan Mendikbud (Kepmen) Nomor 234/P/2018 mengubah struktur Sekretariat Penanggulangan Bencana agar penanganan bencana dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan efisien serta dapat mengantisipasi dampak buruk dari terjadinya bencana alam di Indonesia.

Kepmen itu menggantikan Kepmen sebelumnya dengan Nomor 8953/A. A2.1/KP/2014 tentang Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud. Melihat dampak yang ditimbulkan dari berbagai ranah kehidupan termasuk ranah pendidikan, penanggulangan bencana ini tidak cukup hanya mengandalkan satu unit kerja tertentu di Kemendikbud.

Selain mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanganan bencana, Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud juga melakukan pemetaan

program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tugas lainnya meliputi koordinator pelaksanaan rencana aksi program satuan pendidikan aman bencana 2015-2019 serta melakukan pendampingan teknis penerapan satuan pendidikan aman bencana di sekolah-sekolah.

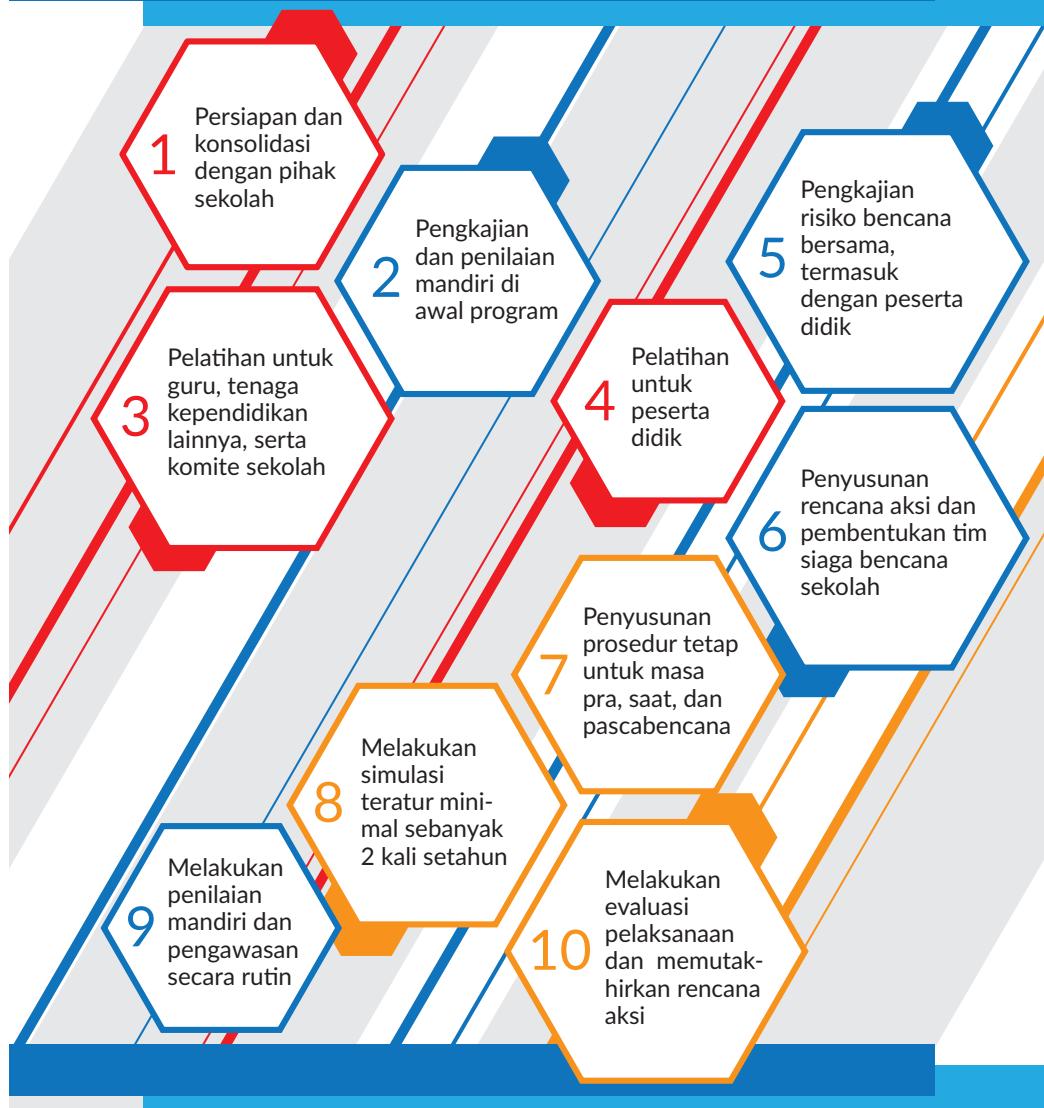
Di samping itu, Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud juga bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penerapan satuan pendidikan aman bencana melalui berbagai media. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program pra bencana di bidang pendidikan serta menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman bencana paling sedikit satu kali dalam satu semester menjadi tugas utama dari Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud.

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendikbud selaku Sekretaris Sekretariat Penanggulangan Bencana, Ahmad Mahendra mengatakan, penanggulangan bencana di bidang pendidikan harus memiliki sistem agar usaha mengembalikan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana tetap dapat berjalan. Program-program bantuan yang telah direncanakan oleh tim, kata dia, tetap dapat diantisipasi walaupun terjadi bencana dalam waktu berdekatan dengan lokasi yang berbeda seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Untuk itu perubahan struktur Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud tahun ini bertanggung jawab memastikan keberlanjutan penanganan bencana bidang pendidikan di lokasi terdampak

10 LANGKAH MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Salah satu tugas Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud adalah melakukan pemetaan program aman bencana dan penerapan satuan pendidikan aman bencana. Setidaknya ada 10 langkah mewujudkan satuan pendidikan aman bencana tersebut, yaitu:



bencana hingga layanan pendidikan kembali berjalan normal. "Kita tetap menyelesaikan penanganan bencana di satu daerah sampai tuntas walaupun

fokus penanganan bencana beralih ke lokasi bencana lainnya yang sangat membutuhkan bantuan dan penanganan," tegas Mahendra. (DNS/ABG)

Selain mengoordinasikan berbagai pihak dalam penanganan bencana, Sekretariat Penanggulangan Bencana Kemendikbud juga melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Reaksi Cepat Tanggap Kemendikbud

Dukung Percepatan Pemulihan Pascabencana di NTB

Satu hari setelah gempa bumi menimpa Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) langsung menurunkan tim untuk memeriksa kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana, serta siswa dan guru yang menjadi korban. Melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB, tim bertugas melakukan pendataan dan memastikan pembelajaran terus dapat berlangsung dengan menggunakan fasilitas darurat. Kerja sama dan koordinasi antara Kemendikbud, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), membantu percepatan pemulihan di NTB.

BERDASARKAN DATA per 16 Oktober 2018 dari LPMP NTB, jumlah sekolah terdampak bencana di NTB mencapai 1.171 unit atau sekitar 17 persen dari jumlah sekolah di NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 sekolah tergolong rusak berat, 319 sekolah rusak sedang, dan 341 sekolah rusak ringan, dengan total 4.669 ruang kelas yang rusak. Kerusakan terbanyak ditemukan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat. Selain itu terdapat 218.224 siswa serta 2.162 guru yang terdampak bencana gempa di NTB.

Selain cepat menurunkan tim untuk pendataan, Kemendikbud juga sigap membangun tenda darurat untuk dijadikan sebagai ruang kelas sementara bagi siswa dan guru yang terdampak bencana. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy pun segera menuju lokasi bencana untuk meninjau langsung kondisi di sana.

Bantuan logistik yang diberikan, di antaranya:



Diklat pendidikan darurat bagi 400 guru dan kepala sekolah

Bantuan pembelian sarana pembelajaran dalam kondisi darurat untuk 228 sekolah dengan total Rp 1,28 miliar



62 paket media pembelajaran dari Pustekkom



21 truk distribusi bantuan siswa dan alat pembelajaran (berupa pakaian, perlengkapan belajar, alat permainan, dan lain-lain)



Pendirian 425 tenda untuk kelas darurat



Layanan trauma healing



Pemutaran film edukatif bersama

Kunjungan pertama Mendikbud berlangsung pada Senin (30/7/2018), di Sumbawa Besar. Saat itu Mendikbud mengatakan, Kemendikbud menyiapkan tenda untuk menjadi ruang kelas sementara dan memberikan bantuan perlengkapan sekolah, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan. Sementara untuk sekolah rusak akan segera dilakukan rehabilitasi atau revitalisasi, salah satunya dengan membangun gedung baru. "Intinya jangan sampai kerusakan mengganggu proses pembelajaran siswa," ujarnya.

Per tanggal 10 Oktober 2018, tercatat sudah 133 tenda kelas darurat dan 179 terpal dibangun oleh Kemendikbud dengan bantuan pemerintah daerah dan relawan pendidikan. Kemendikbud juga memberikan 29.000 paket peralatan sekolah untuk siswa. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas) bersama LSM dan relawan, Kemendikbud memberikan layanan psikososial atau *trauma healing* untuk para siswa dan guru. Selain itu, untuk menghibur para pengungsi, Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) menyelenggarakan pemutaran film edukatif di beberapa lokasi pengungsian. Hal lain yang dilakukan Kemendikbud antara lain distribusi buku cerita rakyat, logistik sembako, selimut, pakaian, obat-obatan, serta makanan dan minuman.

Bersama para relawan, Kemendikbud membentuk Pos Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Posko Gasgabpad)

Intinya jangan sampai kerusakan menganggu proses pembelajaran siswa.

Mendikbud Muhamad Effendy

Pendidikan. Tercatat sebanyak 376 organisasi masyarakat dengan total 3.435 personel bersinergi dan berkoordinasi mendukung upaya percepatan pemulihan pascabencana di NTB. Lembaga dan relawan tersebut antara lain UNICEF, Rumah Pelangi, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Wahana Visi Indonesia, Kerajaan Dongeng, Yayasan Gugah Nurani Indonesia, LAZNAS, dan Kidsmile Foundation. Melalui posko yang dikomandoi oleh LPMP NTB itu, unsur pemerintah maupun masyarakat saling berbagi informasi dan sumber daya untuk membantu percepatan pemulihan pendidikan di NTB.

Strategi Pembelajaran di Daerah Bencana

Salah satu program yang dilakukan bersama adalah merumuskan dan menjalankan strategi pembelajaran untuk siswa terdampak bencana. Mereka menyepakati bahwa strategi pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi masing-masing, misalnya di kelas darurat sementara, baik di halaman sekolah maupun di lokasi pengungsian. Pembelajaran

Strategi Pembelajaran Pascabencana di NTB:

Semua sekolah di daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mulai melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi:

Memaksimalkan metode dan strategi pembelajaran luar ruang, pembelajaran pola sekolah alam, dan sejenisnya.



Pembelajaran awal di kelas darurat sementara, baik di halaman sekolah maupun di lokasi pengungsian.

Strategi pelaksanaan pembelajaran disesuaikan situasi dan kondisi masing-masing.

Memaksimalkan penggunaan media-media pendidikan, alat permainan, alat peraga, dan alat pendukung lainnya.

Pembelajaran menyesuaikan dengan mengedepankan kegiatan permainan, psiko-edukasi, dan psikososial

Di tahap pemulihan, Kemendikbud memberikan program pembekalan untuk guru, berupa pelatihan dalam pengelolaan dan pembelajaran di satuan pendidikan dalam keadaan darurat.

juga disesuaikan dengan mengedepankan kegiatan permainan, psikoedukasi, dan psikososial, dengan memaksimalkan penggunaan media-media pendidikan, alat permainan, alat peraga, dan alat pendukung lainnya. Relawan juga memaksimalkan metode dan strategi pembelajaran luar ruang, pembelajaran pola sekolah alam, dan sejenisnya.

Beberapa kegiatan tanggap darurat yang dilakukan Posko Gasgabpad Pendidikan antara lain pendataan satuan pendidikan terdampak (sarpras, siswa, guru), distribusi dan pendirian tenda kelas darurat, distribusi perlengkapan sekolah, kampanye "Kembali ke Sekolah" di pos pengungsian, layanan dukungan psikososial, dan koordinasi bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi ruang kelas yang rusak dengan Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK.

Tahap Pemulihan

Arah pembangunan pendidikan pascabencana di NTB semakin fokus setelah kunjungan kedua Mendikbud pada 14 Agustus 2018. Saat itu arahan Mendikbud adalah agar dalam waktu paling lambat satu tahun, sekolah yang mengalami rusak berat akan dirobohkan untuk dibangun kembali.

Proses belajar mengajar juga harus tetap berlangsung meskipun dilakukan di ruang kelas darurat. Kemudian pembangunan gedung sekolah terdampak bencana diharapkan sesuai dengan sistem zonasi. Penanganan darurat bidang pendidikan pun sudah melewati tahap tanggap darurat, sehingga dimulai transisi dari status tanggap darurat ke pemulihan.

Dalam tahap pemulihan dilakukan aktivasi program, antara lain rehabilitasi sekolah rusak ringan oleh Kemendikbud, pembangunan sekolah darurat, pemberian KIP khusus, dan pemenuhan Tunjangan Khusus untuk Guru. Tunjangan Khusus diberikan kepada 5.298 guru terdampak bencana di NTB, yaitu di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Sumbawa. Mendatang, dimungkinkan penambahan jumlah penerima bantuan seiring dengan pemutakhiran

data yang dilakukan. Tunjangan Khusus untuk guru PNS sebesar Rp1,5 juta setiap bulan, sedangkan untuk guru non-PNS sebesar Rp2 juta setiap bulan. Tunjangan tersebut diberikan selama enam bulan, sehingga guru PNS akan menerima total tunjangan khusus sebesar Rp9 juta, dan guru non-PNS sebesar Rp12 juta. Bantuan kepada guru terdampak gempa di NTB ini merupakan bentuk perlindungan kepada guru sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2017.

Di tahap pemulihan ini Kemendikbud juga memberikan program pembekalan untuk guru. Kepala LPMP NTB, Minjahul Ngabidin mengatakan, program pembekalan yang dijalankan untuk guru-guru di NTB adalah pelatihan guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan dan pembelajaran dalam keadaan darurat.

Narasumber pelatihan tersebut memberdayakan keberadaan LSM, relawan, Tim Psikososial Kemensos, serta organisasi profesi guru seperti Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Per tanggal 1 Oktober 2018, lebih dari 1.000 guru mengikuti pelatihan tersebut.

"Untuk menyemangati dan mengapresiasi guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran darurat dan pengelolaan sekolah dalam kondisi darurat, kami juga melaksanakan kegiatan simposium dan lomba inovasi pembelajaran dan pengelolaan sekolah dalam kondisi darurat," tutur Minhajul. Simposium tersebut dilaksanakan pada Desember 2018.

Kerja sama dan sinergi antara pemerintah dengan unsur masyarakat turut membantu terwujudnya percepatan pemulihan kondisi pendidikan di NTB. Hal ini menjadi contoh suksesnya pelibatan publik di bidang pendidikan serta aktivasi ekosistem pendidikan yang baik. Mendikbud Muhamdijir Effendy pun menyampaikan apresiasinya kepada berbagai lembaga. "Saya rasa ini baik sekali, dalam rangka membangun solidaritas, gotong royong. Itu bagian dari pendidikan karakter," katanya. Setidaknya Kemendikbud telah menggulirkan bantuan senilai lebih dari Rp229 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan pemulihan kegiatan belajar mengajar pascabencana di NTB. (DES)

Bahu-membahu Pulihkan Layanan Pendidikan di Sulawesi Tengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan berbagai pihak bahu-membahu memulihkan layanan pendidikan di area-area terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Mulai dari pendirian pos pendidikan, pendirian ruang kelas darurat, renovasi sekolah hingga pembangunan unit sekolah baru sebagai rencana jangka panjang pun telah dipersiapkan oleh Kemendikbud bersama United Nations Children's Fund (UNICEF), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pihak lainnya. Hal ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan akses pendidikan meskipun mereka terdampak bencana.

PADA 28 September 2018 lalu, gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter disertai tsunami dengan ketinggian mencapai 7 meter melanda berbagai wilayah di Sulawesi Tengah di antaranya Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Beberapa saat setelah puncak gempa tersebut, muncul gejala likuefaksi atau hilangnya kekuatan lapisan tanah di Kelurahan Petobo, Kota Palu yang menambah korban jiwa dan kerugian materiel. Bencana itu tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar termasuk di bidang pendidikan.

Pemulihan akses pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Kemendikbud telah mengalokasikan sekitar Rp 246 miliar untuk pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Sulawesi Tengah tersebut dan di masa tanggap darurat Kemendikbud juga telah memberikan bantuan logistik berupa makanan, air mineral, obat-obatan, dan lainnya. Selain memberikan akses pendidikan bagi peserta didik, hal itu juga menjadi titik tolak pembangunan kembali kehidupan mereka pascabencana.

"Proses pembelajaran yang terjadi dapat sekaligus menjadi terapi bagi anak-anak yang terdampak serta membantu keluarga untuk bangkit kembali," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud), Muhamdijir Effendy, di kantor Kemendikbud beberapa waktu lalu.

Hal serupa pun diungkapkan oleh Perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini, bahwa pendidikan merupakan alat pemulihannya penting dalam situasi darurat. Melalui sekolah, lanjutnya, anak-anak dapat dipastikan keberadaannya dan dirawat sebaik-baiknya serta dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu. "Dengan membangun kembali rutinitas harian dan membantu mengembalikan rasa normal, sekolah menjadi suatu bentuk ruang terapi di tengah-tengah kehancuran akibat bencana," tutur Debora Comini. Sebagai langkah awal pemulihan pascabencana, Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mendirikan pos pendidikan yang berpusat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah. Pos pendidikan ini bergegas melakukan pendataan satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan yang terdampak bencana di wilayah tedampak. Selain itu, pos pendidikan juga mengklasifikasikan satuan pendidikan terdampak bencana berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.



Setelah itu, Kemendikbud bersama UNICEF serta pihak lainnya pun segera mendirikan 450 tenda kelas darurat sebagai tempat sementara bagi anak-anak terdampak bencana Sulawesi Tengah untuk memperoleh pembelajaran. Tahap pertama, 200 tenda untuk ruang kelas darurat didatangkan dari lokasi suplai Dubai, Uni Emirat Arab, yang rampung pada 18 Oktober 2018. Selanjutnya sisa 250 tenda untuk ruang kelas darurat didatangkan dari lokasi suplai Kopenhagen, Denmark, yang rampung pada 10 November 2018. Satu tenda berstandar UNICEF itu memiliki kapasitas dua ruang kelas yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa. Berdasarkan data dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 29 Oktober 2018, bencana alam Sulawesi Tengah menyebabkan 1.590 sekolah rusak serta 184.876 murid dan 13.229 guru terdampak. Angka-angka itu masih dapat berubah seiring situasi dan kondisi terbaru di lapangan. Ke depan, Kemendikbud akan mengadakan relokasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak digunakan dan sekaligus menerapkan kebijakan zonasi yang saat ini sudah dilakukan.

Dorong Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sekitar

Pemulihan layanan pendidikan di wilayah bencana khususnya di Sulawesi Tengah ini tentu tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat khususnya untuk membangun ruang-ruang kelas darurat. Berdasarkan data Sekretariat Nasional SPAB per 29 Oktober 2018, kekurangan ruang kelas darurat mencapai sekitar 411 agar dapat melayani siswa-siswi yang terdampak tersebut. Masyarakat sekitar diimbau untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya dalam membangun ruang kelas darurat.

Kemendikbud telah menerapkan model kelas darurat yang efektif dan efisien pada pemulihan bencana di Lombok beberapa waktu lalu. "Dengan 30 juta rupiah sudah bisa 6 kelas darurat. Bahannya tidak beli, hanya atapnya terpal dari Jakarta. Itu bisa bertahan sampai satu tahun," ucap Mendikbud Muhamdijir.

Kemendikbud juga mendorong pemerintah daerah sekitar seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan lainnya agar mengedepankan fleksibilitas

Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mendirikan pos pendidikan melakukan pendataan satuan pendidikan, peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI SULAWESI TENGAH

(Per tanggal 29 Oktober 2018)

1.509

satuan pendidikan terdampak di 4 kabupaten

184.876

siswa terdampak di 4 kabupaten

13.229

guru terdampak di 4 kabupaten



Kab. Donggala:

635



Kota Palu:

378

Kab. Parigi Moutong:

98

Kab. Sigi:

398

LANGKAH DARURAT PENANGANAN GEMPA SULAWESI TENGAH:

- Distribusi bantuan pendidikan (tenda sekolah, 370 paket sekolah, 84 paket rekreasional, 50 paket kebersihan, 50 paket PAUD)
- Memperbarui data sekolah terdampak
- Melakukan verifikasi data sekolah/madrasah rusak

- Melakukan koordinasi rutin di pos pendidikan
- Pelatihan pendidikan dan perlindungan anak dalam situasi darurat bagi pegawai dinas, pengawas, kepala sekolah, dan pegawai lembaga non-pemerintah

pelayanan pendidikan bagi siswa terdampak bencana Sulawesi Tengah. Apabila siswa memutuskan untuk pindah sekolah secara permanen maka sekolah penerima tidak mengedepankan proses birokrasi tetapi lebih mengutamakan penuhan hak anak-anak untuk bisa terus belajar. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak dan atau memiliki hambatan untuk dapat sekolah kembali.

Penanganan masalah pendidikan pascabencana ini memang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja melainkan perlu dukungan berbagai pihak terutama masyarakat. "Intinya semua anak harus belajar tidak boleh tertunda karena bencana. Ini memang berat tetapi kerja keras kita untuk membangun Sulawesi Tengah bangkit kembali dan lebih baik lagi," tegas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. (ABG)

Layanan Dampingan Psikososial

Ajak Masyarakat Lepaskan Rasa Cemas Pascabencana

Salah satu dampak dari peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu pada pertengahan tahun 2018 adalah munculnya rasa cemas, khawatir, dan takut berlebih (trauma) pada masyarakat, termasuk anak-anak.

UNTUK MEMBANTU menanggulangi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan beberapa organisasi dan lembaga sosial memberikan dukungan psikososial awal untuk membantu guru dan anak-anak cepat pulih dan kembali ke sekolah dengan rasa aman.

Dukungan psikososial yang dimaksud adalah Layanan Dampingan Psikososial (LDP) yang merupakan kerja sama antara Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC). LDP diawali dengan melakukan asesmen terhadap guru dan siswa di lingkungan bencana dengan tujuan mengetahui besaran dampak psikologis bencana yang terjadi secara umum.

Jika dampak yang terjadi lebih banyak menimpa guru, maka layanan psikososial terlebih dahulu diberikan kepada guru agar mereka bisa terlepas dari rasa ketakutan dan stres berlebih dalam waktu yang lebih

cepat, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat segera dilakukan. Fase awal dukungan psikososial ini biasanya dilakukan selama dua hari dan berfokus pada pemulihuan emosional guru sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar mengajar.

Pada hari pertama, para guru diberikan kesempatan untuk melepaskan emosionalnya melalui berbagi dan bercerita (sharing) kepada orang lain. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam kelompok besar atau kecil, dan didampingi oleh pihak layanan psikososial. Selanjutnya, guru diberikan keterampilan manajemen stres dalam bentuk teori dan relaksasi, dengan tujuan agar mereka juga menyadari bahwa dalam situasi krisis, wajar jika timbul berbagai reaksi psikologis seperti menjadi lebih takut atau lebih cemas.

Respons tersebut adalah normal dan guru diharapkan dapat menerimanya sebagai keadaan yang normal pula, serta mampu mengatasi dengan hal-hal yang positif. Misalnya dengan mengingat hal-hal apa yang membuat mereka bertahan menghadapi situasi sulit atau dengan

Beberapa Dukungan Psikososial yang Dilakukan:

Kegiatan berbagi dan bercerita (sharing)

Mendongeng, menggambar, dan mewarnai

Nonton film bareng

Bermain permainan tradisional

Bermain alat musik



Di samping itu, Kemendikbud juga menggulirkan sebanyak 50 paket dukungan psikososial senilai Rp 8,3 miliar untuk bencana di Sulawesi Tengah



dukungan keluarga, masyarakat, dan kegiatan rohani.

Dalam proses keterampilan manajemen stres, guru dibekali kemampuan 3L, yaitu look, listen, and link (melihat, mendengar, dan menghubungkan). Look adalah melihat dengan peka atas reaksi yang terjadi pascabencana; listen adalah mendengarkan masalah atau keluhan yang terjadi pascabencana dan berdampak pada emosional; serta link adalah menghubungkan dengan layanan yang lebih tinggi seperti psikolog untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut atas reaksi pascabencana yang masih berkelanjutan, misalnya mimpi buruk yang berkepanjangan, takut bersosialisasi, atau trauma berlebihan sehingga tidak mau masuk ruangan.

Setelah melakukan proses sharing dan mendapatkan keterampilan manajemen stres, pada hari kedua guru akan diberikan pembekalan tentang bagaimana membentuk mekanisme dukungan psikososial antarguru. Hal ini dilakukan agar di dalam sekolah terbentuk lingkungan yang saling mendukung, karena pemulihan pascabencana akan berlangsung dalam waktu panjang sehingga dibutuhkan lingkungan kekeluargaan yang saling mendukung.

Selain itu, guru juga diberi kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh kepada siswa dan mengaplikasikan ke dalam beberapa kegiatan yang menghubungkan fisik, kreatif, manipulatif, komunikatif, dan imajinatif seperti menggambar, mendongeng, bermain, menyusun gambar (puzzle), atau kegiatan yang mengasah kreativitas. Misalnya dalam menghias tenda, siswa mempunyai kesempatan berinteraksi dengan kelompok dan lingkungan lain, sehingga dapat menstimulasi terjadinya interaksi sosial.

Sementara itu, dukungan psikososial kepada anak-anak diberikan dalam bentuk kegiatan mendongeng, menggambar, dan mewarnai. Ada pula kegiatan nonton film bareng di berbagai pos pengungsian. Film yang diputar merupakan film Indonesia yang telah disewa hak tayangnya oleh Kemendikbud, seperti "Iqra", "12 Menit untuk Selamanya", "Knight Kris", dan "Negeri Dongeng".

Dukungan psikososial juga dilakukan lewat kegiatan pelestarian kebudayaan dengan mengenalkan dan mengajak anak terlibat dalam permainan tradisional seperti egrang dan membatik. Kegiatan berkesenian, seperti bermain alat musik juga diberikan kepada anak-anak korban bencana ini. **(PRM)**

37 Ribu Lebih Sekolah

Ada di Wilayah Risiko Tinggi Bencana Alam

Mengenal Risiko Bencana dan Dampaknya Terhadap Pendidikan

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari sumber data pokok pendidikan (Dapodik) 2015, ada sebanyak 37.408 sekolah berada di wilayah risiko tinggi multibahaya. Risiko tinggi yang dimaksud adalah ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan longsor.

Pemetaan sekolah yang berada di wilayah risiko tinggi ini perlu diketahui sehingga diharapkan dapat memperkecil dampak yang timbul dari bencana alam apabila terjadi. Lalu seperti apa gambaran risiko sekolah dan dampak bencana terhadap pendidikan? Informasi tersebut JENDELA rangkum dalam infografis berikut.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi, yaitu:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Gempa bumi | 9. Gelombang ekstrim dan abrasi |
| 2. Tsunami | 10. Kebakaran hutan dan lahan |
| 3. Letusan gunung api | 11. Epidemi dan wabah penyakit |
| 4. Gerakan tanah | 12. Gagal teknologi |
| 5. Banjir | |
| 6. Banjir bandang | |
| 7. Kekeringan | |
| 8. Cuaca ekstrim | |

37.408 SEKOLAH

(Dapodik, 2015) yang berada di wilayah risiko tinggi bencana alam:

Gempa bumi	14.859
Banjir	11.509
Longsor	9.334
Tsunami	1.617
Letusan gunung api	89

PETA INDEKS RAWAN BENCANA

TAHUN 1811



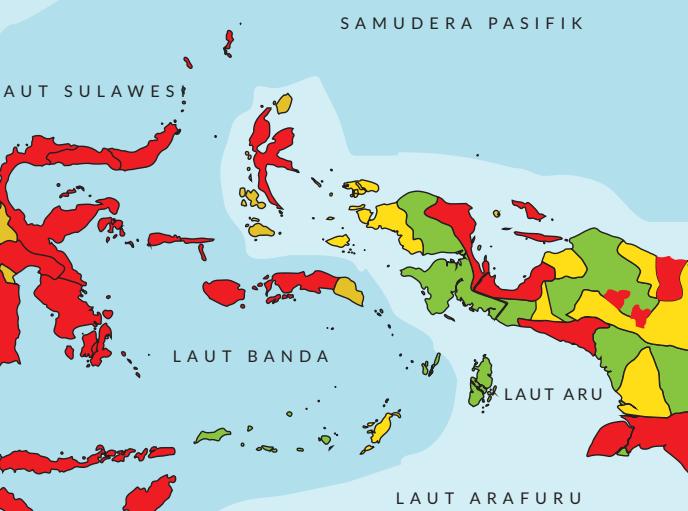
Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi.

Dampak gempa terhadap sekolah-sekolah di Indonesia (2004-2017)



BENCANA INDONESIA

5 - 2012



Dampak gempa dan tsunami terhadap sekolah di NTB dan Sulteng (2018)

NTB

(data per 2 September 2018)

1.235 satuan pendidikan terdampak
4.713 ruang kelas rusak
218.224 siswa terdampak

SULTENG

(data per 15 November 2018)

1.072 satuan pendidikan terdampak
6.273 ruang kelas rusak
243.682 siswa terdampak
16.521 guru terdampak

Total bantuan yang diberikan Kemendikbud untuk bencana di NTB dan Sulteng per November 2018 mencapai lebih dari

 **Rp 555 miliar**

Kemendikbud bersama **Badan Nasional Penanggulangan Bencana** dan sejumlah pihak terkait menyusun program **Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)** sebagai upaya **memperkecil dampak dari bencana alam** yang terjadi. Penerapan kebijakan SPAB dilakukan melalui:

- **Membangun** pemahaman masyarakat tentang **pentingnya kesiagaan** bencana, misalnya melalui sosialisasi, seminar, dan lokakarya; materi publikasi terkait bencana, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, dan lain-lain.
- Melakukan **peningkatan kapasitas teknis**, seperti pelatihan bagi guru, simulasi evakuasi bersama.
- Meningkatkan **dukungan dan legitimasi**, antara lain berupa regulasi di tingkat nasional maupun daerah.

Pendidikan Tanggap Bencana

Minimalkan Risiko Bencana Melalui Program SPAB

Secara geografis, wilayah Indonesia rentan terkena bencana alam. Saat bencana terjadi, tidak hanya masyarakat yang menjadi korban. Rumah dan bangunan fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, gedung perdagangan, dan lainnya juga terancam rusak.

AKIBATNYA SEKTOR perekonomian dan pendidikan terganggu, bahkan lumpuh dalam kurun waktu tertentu. Dampak bencana di sektor pendidikan sebenarnya dapat diminimalkan, salah satunya melalui penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB).

Berdasarkan hasil pemetaan bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia, ternyata sekitar 75 persen sekolah-sekolah di Indonesia teridentifikasi berada di kawasan berisiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Menurut penelitian ini juga, frekuensi dari terjadinya bencana tersebut terus meningkat, serta banyak memakan korban dan merusak bangunan termasuk gedung-gedung sekolah.

Sejak tragedi gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 hingga bencana alam yang sama di Sulawesi Tengah pada 2018, diperkirakan hampir 50 ribu satuan pendidikan terdampak bencana. Sebagian besar di antaranya dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru yang membutuhkan waktu dalam pengerjaannya.

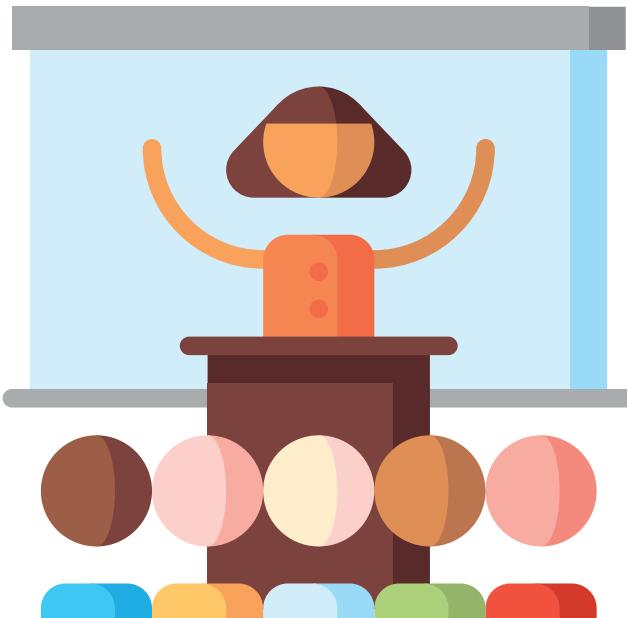
Sekolah yang rentan terhadap bencana tidak saja meningkatkan risiko keamanan terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lain, namun juga dapat

mempengaruhi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang terletak di daerah rawan bencana perlu dibekali dengan kesiapsiagaan bencana, baik dari segi pengetahuan bencana dalam mata pelajaran, simulasi evakuasi, dan juga dari segi struktur bangunan sekolah untuk mengurangi risiko bencana tersebut.

Pendekatan Tiga Pilar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak lainnya menyusun program untuk mewujudkan satuan pendidikan aman bencana di Indonesia. Pendekatan dilakukan secara komprehensif melalui tiga pilar, yaitu pilar fasilitas sekolah aman, pilar manajemen bencana di sekolah, serta pilar pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ketiga pilar ini saling beririsan untuk memperkuat tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan satuan pendidikan aman bencana.

Pilar pertama, yaitu fasilitas sekolah aman merupakan fasilitas sekolah dengan gedung, isinya, dan halaman sekitarnya yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan, dan keamanan. Fasilitas sekolah aman ini di antaranya meliputi pemilihan lokasi dan



Prinsip-prinsip utama yang mesti diterapkan saat menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah:

✓ Berpusat pada anak, di mana anak dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta seluruh tindakan berdasarkan kebutuhan spesifik anak.

✓ Sejalan dengan kebijakan dan perencanaan sektor pendidikan serta selaras dengan rencana di daerah setempat.

✓ Kegiatan dimulai dengan melakukan kajian risiko yang melibatkan seluruh pihak sekolah, termasuk anak-anak.

Sumber: Buku Pendidikan Tangguh Bencana, 2017, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud

desain bangunan yang aman terhadap bencana.

Sementara itu, pilar kedua yaitu manajemen bencana merupakan proses pengkajian yang diikuti oleh perencanaan terhadap perlindungan fisik, perencanaan pengembangan kapasitas dalam melakukan respons/tanggap darurat, dan perencanaan kesinambungan pendidikan. Kerja sama dengan berbagai mitra di bidang manajemen bencana diperlukan untuk menjaga lingkungan belajar yang aman serta merencanakan kesinambungan pendidikan, baik saat terjadi bencana maupun tidak terjadi bencana sesuai standar internasional.

Pilar terakhir, yaitu Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dilakukan dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti pelatihan atau pembekalan tentang penanggulangan bencana, mengenali

risiko bencana di sekitar lingkungan sekolah, merencanakan integrasi kurikulum ke dalam rencana belajar, menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan PRB, dan memadukan pendidikan kesiapsiagaan bencana ke dalam kebijakan sekolah. Pendidikan PRB dilakukan agar mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat mengenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik. PRB dirancang untuk membangun budaya aman dan komunitas yang tangguh.

Mewujudkan sekolah aman yang komprehensif sangat penting karena dapat melindungi warga sekolah dari risiko kematian dan cedera di sekolah, merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi baha yang sudah diperkirakan, memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan, serta melindungi investasi di sektor pendidikan. **(RAN)**

Siapkan Warga Sekolah Hadapi dan Tanggulangi Bencana

Posisi Indonesia yang berada di pertemuan lempeng dan lintasan cincin api, serta curah hujan yang tinggi, serta berada pada lintasan khatulistiwa menjadikannya sebagai negara yang sangat tinggi risiko bencananya.

KONDISI SEPERTI itu membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun kebijakan untuk mempersiapkan setiap individu yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar siap menghadapi dan menanggulangi terjadinya bencana.

Modul ini merupakan seri ke-2 dari tiga modul yang disiapkan, yaitu seri modul standar penyebaran pengetahuan mengenai sekolah aman bagi guru dan/atau fasilitator. Modul 1 berjudul Fasilitas Sekolah Aman. Modul 3 berjudul Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana.

Modul seri ke-2 ini membantu memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang peduli dan tertarik untuk berperan aktif dalam setiap fase bencana terutama untuk mempersiapkan penanggulangan bencana di sekolah oleh setiap sekolah untuk mempersiapkan kesiagaan bencana. Pada halaman 13 ditampilkan langkah-langkah utama untuk mempersiapkan kesiagaan bencana di lingkungan sekolah. Langkah utama itu antara lain melakukan identifikasi dampak bahaya terhadap sekolah, profil sekolah yang terus diperbarui, membuat latihan-latihan untuk berbagai macam bencana, serta langkah penting lainnya.

Modul ini menjelaskan tentang perlunya sekolah mengetahui keadaan sesungguhnya tentang risiko bencana yang akan dihadapi. Penting diingat bahwa sekolah perlu membuat peta risiko

dan sumber daya sekolah beserta lingkungannya. Peta ini membantu dalam mengenali dan memikirkan cara untuk mengatasi kesenjangan antara kerentanan dan kapasitas.

Perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana di sekolah bertujuan agar risiko terhadap korban, rusaknya bangunan dan fasilitas sekolah bisa dikurangi. Banyak rencana yang perlu disusun seperti SOP, kontingensi juga simulasi. Buku ini memaparkan bagaimana prosedur dalam mempersiapkan dan menghadapi bencana.

Siapa saja yang perlu membaca buku ini? Tentu saja semua pihak yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesiapan dan penanggulangan bencana di sekolah. Uraian tim penyusun lebih mudah dipahami karena memuat sejumlah ilustrasi, seperti daftar uraian dan bagan.

Namun banyaknya uraian yang dirasa perlu untuk dimasukan dalam modul ini membuat modul ini menjadi sedikit lebih padat. Ukuran huruf juga dirasa cukup kecil dan beberapa kata yang tidak baku masuk dalam modul ini, seperti kontijensi (kata tidak baku untuk kontingensi). Selebihnya, buku ini sangat tepat dimanfaatkan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai bahan pembelajaran bagi siswa untuk mempelajari manajemen bencana di sekolah. (ARI)



Judul Buku:
Modul 2, Manajemen Bencana di Sekolah

Penulis:
Tim Penyusun Modul

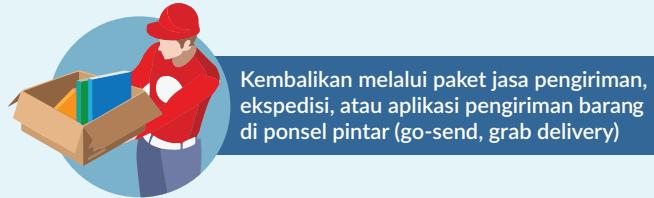
Penerbit:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun Terbit:
2015

Halaman:
96 halaman

Pilihan Cara Pengembalian Koleksi Perpustakaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Prosedur pengembalian:



- 1 Menyerahkan koleksi
- 2 Menyerahkan kartu anggota. Jika melalui jasa pengiriman, tuliskan nomor anggota dan nama di bagian alamat pengiriman.
- 3 Petugas akan menyampaikan apakah ada masalah dalam pengembalian koleksi tersebut
- 4 Apabila Koleksi terlambat dikembalikan, maka anggota tidak diperbolehkan meminjam sesuai dengan lama keterlambatan
- 5 Apabila koleksi yang dipinjam hilang, maka anggota wajib mengganti dengan koleksi dengan data yang sama (judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit sama)
- 6 Apabila koleksi yang dipinjam rusak, anggota juga wajib mengganti dengan koleksi dengan data yang sama (judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit sama)
- 7 Identitas anggota akan dikembalikan apabila koleksi telah selesai dikembalikan. Untuk koleksi yang rusak atau hilang, identitas anggota belum bisa dikembalikan sampai koleksi tersebut diganti
- 8 Perpustakaan tidak menerima uang untuk penggantian koleksi yang hilang



Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

Rumuskan Strategi untuk Tata dan Kelola Kebudayaan Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan kembali menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). KKI 2018 terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan 100 tahun KKI sejak pertama kali diselenggarakan pada 1918 di Surakarta, Jawa Tengah. KKI 2018 merumuskan strategi kebudayaan yang disusun masing-masing pemerintah provinsi ke tingkat nasional untuk menata dan mengelola kebudayaan Indonesia.

PERUMUSAN STRATEGI kebudayaan menjadi agenda sangat penting dalam KKI 2018. Namun, strategi kebudayaan yang disusun tentunya tidak mengatur hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan di lapangan.

“Mereka sudah hidup. Tapi yang hidup ini arahnya ke mana? Mau mencapai apa? Bagaimana koherensinya di dalam rentang waktu tertentu? Itulah mengapa strategi kebudayaan relevan untuk dibicarakan,” ujar Direktur Jenderal

Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid.

Strategi kebudayaan yang disusun kali ini menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan akhirnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah di bidang kebudayaan. Strategi kebudayaan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2007 pasal 13 ayat 2 pada poin a yang berbunyi strategi kebudayaan berisi abstrak dari dokumen pokok-pokok pikiran





kebudayaan daerah provinsi, pokok-pokok pikiran daerah kabupaten/kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia.

Basis dari strategi kebudayaan ini adalah data-data yang dihimpun secara masif, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, yang diberi nama Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Sejak Maret 2018, pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan komunitas dan perguruan tinggi, menggeliat, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi berbagai kebudayaan yang ada di kabupaten/kotanya masing-masing.

Proses pendataan kebudayaan seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Basis informasi ini akan sangat membantu merumuskan strategi kebudayaan yang konkret dan bisa membantu operasional dalam bertindak, utamanya bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu langkah dan strategi ini juga menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada baik di bidang kebudayaan atau lainnya.

Dalam menyusun strategi pemajuan kebudayaan diperlukan proses partisipasi dari tiap-tiap daerah, kemudian dilakukan pembahasan bersama di tingkat nasional. Semakin

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, harapannya semakin banyak daerah yang mengumpulkan pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah.

**Mendikbud
Muadjir Effendy**

banyak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang menyerahkan PPKD maka semakin menyempurnakan cetak biru strategi pemajuan kebudayaan Indonesia.

PPKD yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan bentuk upaya penguatan tata kelola kebudayaan terkait 10 objek pemajuan kebudayaan. Kesepuluh objek pemajuan kebudayaan itu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

KKI 2018 juga menjadi momen yang sangat signifikan karena bertemu dari berbagai arus, yaitu siklus lima tahunan KKI, tepat 100 tahun KKI, dan kongres pertama setelah berlakunya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Saya juga memiliki harapan khusus, rumusan kongres ini memiliki nilai historis untuk generasi-generasi mendatang," tutur Hilmar.

Guna menunjang KKI 2018, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menyelenggarakan Forum Pra KKI yang berlangsung pada 4-6 November 2018 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti



oleh sekitar 400 peserta yang berasal dari budayawan, seniman, sejarawan, komunitas budaya, pegiat budaya, perwakilan individu, perwakilan lembaga/instansi/yayasan/asosiasi, akademisi, pakar, antropolog, kelompok difabel, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peserta melakukan diskusi yang terbagi dalam 11 forum yang dilaksanakan di kegiatan Pra KKI. Hasil rekomendasi tersebut akan disatukan dalam penyusunan rekomendasi pemangku kepentingan kebudayaan untuk penyusunan strategi kebudayaan nasional pada KKI mendatang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Sri Hartini menekankan, pentingnya keterlibatan publik dalam menghasilkan strategi kebudayaan yang tecermin dalam penyusunan PPKD. Selain itu penyusunan strategi kebudayaan kali ini merangkul ratusan ahli serta pelaku budaya untuk menghasilkan rekomendasi saat Pra KKI. "Di mana kuncinya adalah keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan," tambahnya.

KKI 2018 diselenggarakan pada 5-9 Desember 2018 di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Aspirasi dari daerah ini yang membedakan penyelenggaraan KKI 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hilmar Farid

Hasil strategi kebudayaan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Desember 2018 dengan masa berlaku 20 tahun dan dapat diperbaharui setiap 5 tahun.

Visi akhir dalam memajukan kebudayaan yakni menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara perdamaian abadi. Pada masa lampau misi itu berupa pertahanan dari ancaman-ancaman kedaulatan negara. Namun, di era sekarang kebudayaan memiliki posisi yang teramat penting dalam ketahanan budaya, yakni melindungi segenap bangsa dari arus kebudayaan global. (RWT)

KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA 2018

Berkepribadian dalam Kebudayaan



Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 adalah musyawarah akbar pengambil kebijakan bidang kebudayaan di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 5 tahun 2017. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, dalam kongres ini juga dilaksanakan pengesahan Strategi Kebudayaan oleh Presiden RI.

RANGKAIAN KEGIATAN MENUJU KKI 2018:

26 APRIL 2018

Lokakarya penyusunan PPKD di 20 Klaster Kerja

AGUSTUS 2018

Prakongres 1:

Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota. Penetapan PPKD Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota

OKTOBER 2018

Prakongres 2:

Penyusunan PPKD Provinsi. Penetapan PPKD Provinsi oleh Gubernur

27 NOVEMBER 2018

Prakongres 3:

Forum penggalian masukan terhadap rancangan rumusan Strategi Kebudayaan yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan



- Sebanyak 279 kabupaten/kota dari 27 provinsi telah menyerahkan PPKD.



DESEMBER

Kongres Kebudayaan:

Penetapan Strategi Kebudayaan oleh Presiden RI

Pawai Kebudayaan:

34 Provinsi, 75.000 partisipan → 17 provinsi dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia, 17 Provinsi dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia.

Dari titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Pawai Kebudayaan mengiringi Presiden ke Istana Negara.

Festival Film Indonesia



Strategi Pembelajaran di Daerah Rawan Bencana Lewat Permainan Tradisional, Siswa Terbantu Pahami Materi Kebencanaan

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga berada di urutan atas ranking bencana dunia. Karena kondisi itulah, sudah menjadi keharusan agar setiap warga negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang bencana alam, termasuk anak-anak. Penelitian ini menunjukkan, cara belajar lewat permainan tradisional dapat membantu pemahaman siswa terhadap suatu materi kebencanaan.

Oleh:
Sri Tatminingsih dan Sudarwo
Universitas Terbuka

DAMPAK BENCANA terhadap manusia begitu beragam tergantung dari cakupannya seperti kehilangan jiwa dan harta benda, rusaknya infrastruktur, sulitnya masyarakat memperoleh kebutuhan primer hingga melonjaknya harga barang. Masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam dan mengurangi dampaknya dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau mitigasi.

Ridwan (2008) mengatakan, mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Diharapkan dengan mitigasi ini, ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam bisa meningkat sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi. Kearifan lokal sangat membantu kesuksesan mitigasi. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Kegiatan mitigasi bencana dapat dilakukan melalui proses pembelajaran di sekolah. Misalnya saja pada materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk siswa kelas 3 Sekolah Dasar

(SD) yang di dalamnya memuat materi tentang banjir dan gempa bumi. Materi pembelajaran itu dapat lebih efektif jika disampaikan melalui permainan. Permainan tradisional menjadi tepat, mengingat kini mulai ditinggalkan. Guru dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak.

Tatminingsih (2009) menyebut, permainan tradisional merupakan simbolisasi pengetahuan yang turun temurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan sosial. Dibalik bentuknya yang sesuai dengan usia anak-anak, aktivitas dalam permainan tradisional dapat mengembangkan aspek psikologis anak dan dapat menjadi sarana belajar sebagai persiapan menuju pendewasaan karakter.

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Masa usia sekolah dasar atau disebut juga sebagai masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah adanya perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, di antaranya, perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian

dan perkembangan fisik anak.

Menurut Darmodjo dalam Rahayu, dkk. (2010) anak usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan intelektual, emosional dan jasmani di mana kecepatan pertumbuhannya bervariasi. Pada massa ini, guru dituntut untuk mengemas perencanaan pembelajaran kepada siswa sehingga mampu merangsang semangat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menciptakan materi yang dekat dengan lingkungan sekitar siswa dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara individual maupun berkelompok. Metode semacam ini diharapkan mampu memberi kesempatan bagi siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Studi Kasus

Berdasarkan data Satuan Koordinator Pelaksana Jawa Barat seperti yang dikutip Kompas, 12 September 2009 dalam Rahayu, dkk (2010), gempa yang terjadi di Jawa Barat pada 2 September 2009 di Tasikmalaya mengakibatkan 1.314 sekolah rusak. Dari jumlah tersebut, 32 sekolah di antaranya hancur, 674 sekolah lainnya rusak berat, serta 608 bangunan sekolah rusak ringan dan sedang. Praktis kondisi ini menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian yang dilakukan pada siswa dan guru di Sekolah Dasar (SD) Puncak Manis serta pemuka masyarakat di Kedungpi, Sukabumi, ini dinilai tepat untuk mengidentifikasi sejauh mana permainan tradisional berdampak terhadap efektivitas pengembangan uji coba paket dan strategi pembelajaran bagi siswa kelas 3 SD di wilayah rawan bencana.

Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, peneliti mencoba mengembangkan cara-cara praktis dan inovatif dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam kegiatan belajar pada anak-anak SD di daerah

rawan bencana. Di sisi lain, permainan merupakan media yang efektif dalam menghilangkan rasa trauma pada anak terdampak bencana. Oleh karena itu, seiring dengan berkurangnya rasa cemas dan ketakutan di masa lalu, harapannya siswa dapat lebih bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran karena dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi, kuesioner, pretes dan postes, dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat, 4 orang guru SD di Kecamatan Kadudampit (SD Cibunar 2 dan SD Puncak Manis), dapat teridentifikasi bahwa kaulinan barudak (permainan anak) tradisional di sana di antaranya Bancakan, Perepet Jengkol, Oray-orayan, Loncat Tinggi, Sonda, Egrang, Cing Ciripit, dan Pacici Putri.

Setelah dianalisis lebih lanjut, permainan tradisional yang mungkin untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu Oray-orayan, Cing Ciripit dan Pacici Putri. Ketiga permainan ini dipilih juga dengan alasan, para guru mengenal dan tahu cara memainkan permainan ini sehingga guru dapat mengajarkan permainan ini pada anak didiknya.

Pengembangan Paket dan Strategi Pembelajaran

Rahayu, dkk (2010) mengungkapkan bahwa paket pembelajaran yang dikembangkan untuk materi ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD membahas tentang bencana alam. Paket pembelajaran dalam penelitian yang dikembangkan meliputi: buku petunjuk guru, buku siswa, lima booklet seri bencana, video permainan, dan perangkat kartu.

Buku petunjuk guru yang di dalamnya memuat tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sementara buku siswa memuat materi dan petunjuk kerja bagi siswa yang dikaitkan dengan permainan anak dengan lagu pengiring berbahasa Sunda. Lima Booklet seri bencana,

Setelah dianalisis lebih lanjut, permainan tradisional yang mungkin untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu Oray-orayan, Cing Ciripit dan Pacici Putri.

terdiri atas Gempa Bumi, Banjir, Longsor, Gunung Meletus, dan Tsunami. *Booklet* ini dirancang bergambar dan berwarna, serta menggunakan bahasa yang komunikatif.

Video permainan menggambarkan permainan anak yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Perangkat kartu soal disertai jawaban untuk materi bencana gempa bumi dan banjir. Pertanyaan meliputi materi bencana itu sendiri, mitigasi, dan sanitasi. Kartu soal dibuat dengan menggunakan kertas warna agar menarik bagi siswa (Rahayu, dkk.

2010). Selain Paket Pembelajaran, dikembangkan pula strategi dalam membelajarkan materi tersebut dengan mengintegrasikan permainan tradisional anak.

Kesimpulan

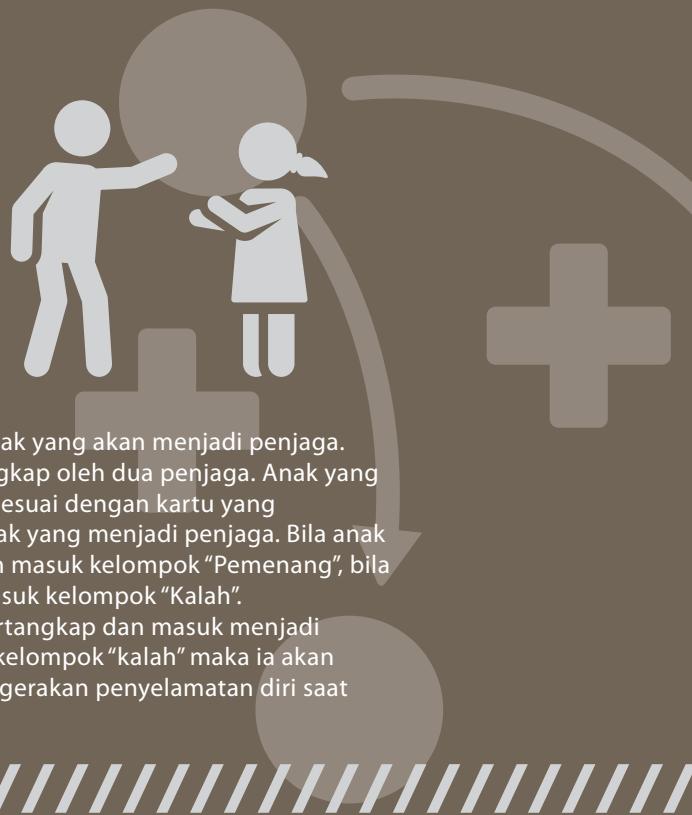
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua siswa kurang mengenal permainan tradisional di wilayahnya. Adapun beberapa permainan tradisional yang masih dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Kadudampit, di antaranya adalah Oray-orayan, Cing Ciripit, Pacici Putri, Sonda, dan Egrang.

Karakteristik siswa SD di daerah rawan bencana umumnya pasif dan kurang kreatif, bergantung pada guru. Paket pembelajaran yang sesuai siswa kelas 3 SD di wilayah rawan bencana berupa bahan ajar cetak, buku bergambar, dan video. Hasil uji coba menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPA untuk materi banjir sebesar 0,58 dan untuk materi

Memahami Materi Kebencanaan dalam Permainan Tradisional

CARA BERMAIN Oray-Orayan

1. Sebelum permainan ini dimulai, tentukan dua anak yang akan menjadi penjaga.
2. Anak yang berada di paling belakang akan ditangkap oleh dua penjaga. Anak yang tertangkap tersebut akan diberikan pertanyaan sesuai dengan kartu yang dipilihnya yang dipegang oleh salah satu dari anak yang menjadi penjaga. Bila anak yang tertangkap menjawab benar, maka dia akan masuk kelompok "Pemenang", bila anak tersebut menjawab salah maka dia akan masuk kelompok "Kalah".
3. Permainan ini berakhir jika semua anak sudah tertangkap dan masuk menjadi anggota kelompok. Bagi anak-anak yang masuk kelompok "kalah" maka ia akan mendapat hukuman, yaitu menirukan salah satu gerakan penyelamatan diri saat terjadi bencana gempa bumi dan banjir.



gempa bumi sebesar 0,79.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan paket pembelajaran yang berupa *booklet* dan buku siswa tentang materi mitigasi dan sanitasi terkait dengan bencana banjir dan gempa bumi yang disampaikan melalui permainan tradisional membantu siswa dalam memahami materi tersebut.

Saran

Pertama, sebaiknya kearifan lokal diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya permainan tradisional anak. Selain untuk melestarikan kearifan masing-masing daerah juga untuk mengenalkan dan menanamkan pada siswa tentang budaya lokal yang dimiliki daerahnya masing-masing. Pengintegrasian ini juga dapat digunakan untuk membuat pelajaran menjadi lebih bervariasi, menarik dan menyenangkan.

Kedua, karakteristik siswa di tiap wilayah berbeda-beda. Sebaiknya dalam menyampaikan pelajaran,

mengembangkan suatu model atau paket pembelajaran pengembang perlu memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh siswa yang akan menggunakannya.

Ketiga, sebaiknya dikembangkan paket pembelajaran yang bisa mengoptimalkan belajar anak yang meliputi bahan ajar cetak, video dan audio sehingga kemampuan belajar siswa yang berupa auditif, visual, audio visual, membaca, dan menulis dapat terakomodasi dengan baik.

Keempat, meskipun strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas, keaktifan dan hasil belajar siswa namun peran guru/pendamping tetap tidak dapat digantikan dengan media.

Kelima, strategi pembelajaran ini masih jauh dari sempurna, semoga ada pihak lain yang merasa berkepentingan yang akan melakukan penelitian dan pengembangan lanjutan sehingga hasilnya semakin sempurna dan dapat diterapkan pada siswa SD kelas 3. (**DLA**)

Pacici-cici Putri

1. Sebelum permainan ini dimulai, tentukan satu anak yang akan menjadi pemimpin permainan.
2. Di akhir lagu, anak yang tangannya ditunjuk harus menjawab pertanyaan dari kartu pertanyaan yang dipilih.
3. Bila anak menjawab benar, maka dia akan masuk kelompok "Pemenang", bila anak tersebut menjawab salah, maka dia akan masuk kelompok "Kalah". Permainan berakhir jika semua akan sudah masuk menjadi anggota kelompok.
4. Bagi anak-anak yang masuk kelompok "Kalah" maka ia akan mendapatkan hukuman, yaitu menirukan salah satu gerakan penyelamatan diri saat terjadi bencana gempa bumi dan banjir.



Cing Ciripit

1. Sebelum permainan ini dimulai, tentukan satu anak yang akan menjadi pemimpin permainan.
2. Di akhir lagu, pemimpin permainan akan menangkap telunjuk salah satu peserta permainan, dan anak tersebut harus menjawab pertanyaan yang dipilih. Bila anak menjadi benar, maka dia akan masuk kelompok "Pemenang", bila anak tersebut menjawab salah, maka dia akan masuk kelompok "Kalah". Permainan berakhir jika semua akan sudah masuk menjadi anggota kelompok.
3. Bagi anak-anak yang masuk kelompok "Kalah" maka ia akan mendapatkan hukuman, yaitu menirukan salah satu gerakan penyelamatan diri saat terjadi bencana gempa bumi dan banjir.

Kongres Bahasa Indonesia XI

Momentum Penegakan Bahasa Negara

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. 2018 menjadi kali ke-11 KBI digelar. Dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta pada 29 Oktober 2018, KBI XI menelurkan 22 rekomendasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa segera merumuskan program kerja sesuai rekomendasi yang dihasilkan KBI XI.

REKOMENDASI DIBACAKAN oleh Ketua Tim Perumus KBI XI, di depan peserta kongres pada 30 Oktober 2018 yang dilanjutkan penyerahan dokumen rekomendasi kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. "Upaya untuk menjayakan bahasa dan sastra merupakan tugas bersama. Kita dalam perahu yang sama, ingin memberikan posisi terhormat kepada bahasa yang kita cintai bersama, bahasa Indonesia," ujar Kepala Badan, Dadang Sunendar.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang menjadi sarana komunikasi dan perekat antardaerah dan antarbudaya. Selain itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan identitas kebangsaan yang selayaknya menjadi kebanggaan bersama. Maka, segala persoalan mengenai kebahasaan tidak boleh dianggap remeh. "Undang-Undang sudah ada. Di dalamnya juga sudah jelas apa yang harus dilakukan. Namun, memang tidak ada sanksi. Maka, kita terus dorong agar pemerintah daerah yang mengatur praktik-praktik penggunaannya sesuai dengan kewenangan," lanjut Dadang.

Terdapat tiga hal utama yang menjadi dasar penyelenggaraan KBI yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa negara. "Kongres Bahasa Indonesia ini menjadi momentum penegakan bahasa negara. Negara wajib hadir di ruang publik melalui bahasa Indonesia," tambahnya.

Sekretaris Badan Bahasa, Abdul Khak mengatakan, sebagai salah satu respons terhadap rekomendasi KBI XI, pihaknya segera merumuskan perencanaan program kerja. "Saya selaku sekretaris badan, bersama-sama para kepala pusat, berupaya menerjemahkan rekomendasi kongres ke dalam bentuk perencanaan selama lima tahun ke depan sampai menjelang kongres berikutnya," kata Abdul Khak.

Peluncuran Produk dan Pemberian Penghargaan

KBI XI juga meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille; Buku Bahasa dan Peta Bahasa; Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan (Daring); Korpus Indonesia; Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Daring; Buku Sastrawan Berkarya di Daerah 3T; 546 buah buku bahan bacaan literasi; Kamus Vokasi; Kamus Bidang Ilmu, dan; Aplikasi Senarai Padanan Istilah Asing (SPAI).

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhamad Effendy, memberikan penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa Indonesia dan tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pihak yang telah mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar khususnya di ruang publik.

KBI XI diselenggarakan mulai tanggal 28 s.d. 31 Oktober 2018, dengan mengusung tema "Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia". "Bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Saya imbau kepada semua pemangku kepentingan agar ruang publik di Indonesia

tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia," ujar Mendikbud.

Peneguh Identitas Bangsa

Mendikbud menjelaskan, peran dan fungsi bahasa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. "Keberagaman

bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Oleh sebab itu, posisi bahasa Indonesia harus diutamakan sebagai peneguh identitas bangsa dan pemersatu keberagaman. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional," jelas Mendikbud. (RYK)



Rekomendasi KBI XI

- 1 Meningkatkan sinergi untuk pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan demi mencapai target menjadi bahasa internasional pada 2045.
- 2 Menertibkan penggunaan bahasa asing.
- 3 Memperluas penerapan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)
- 4 Meningkatkan pemasarakatan kamus bidang ilmu dan teknologi.
- 5 Memperkuat pembelajaran sastra di sekolah
- 6 Menetapkan jumlah karya sastra yang wajib dibaca oleh siswa
- 7 Mendorong kebijakan pengembangan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia dan bereputasi internasional.
- 8 Penguatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang memantik keterampilan bernalar aras tinggi.
- 9 Mendarangkan produk kebahasaan dan kesastraan
- 10 Menegakkan peraturan perundang-undangan kebahasaan

Menerbitkan ketentuan dan pedoman kegiatan mendongeng dan membacakan cerita pada anak-anak usia dini.

Meningkatkan dan memperluas revitalisasi tradisi lisan.

Mengintensifkan pendokumentasián bahasa dan sastra daerah secara digital.

Mengembangkan sarana kebahasaan dan kesastraan bagi penyandang disabilitas.

Meningkatkan kebanggaan berbahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan

Perencanaan bahasa daerah, khususnya di Papua harus dilakukan dengan tepat, sehingga diharapkan literasi siswa di Papua meningkat.

Berkomitmen dalam pertamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik

Mengelola bahasa dan sastra daerah dalam upaya pelestarián dan penyusunan data dasar

Meningkatkan profesionalisme Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), program studi S2 BIPA, dan pendirian lembaga sertifikasi profesi pengajar BIPA.

Mengembangkan sikap dan kesantunan berbahasa.

Menuntaskan penelitian pemetaan dan melakukan penelitian kekerabatan bahasa daerah di seluruh Indonesia.

Memutakhirkán kebijakan politik bahasa dan sastra serta memperkuat kelembagaannya.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Perjalanan Kongres Bahasa Indonesia (KBI)

I. Solo, 25 – 27 Juni 1938

Perlunya disusun tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia.

II. Medan, 28 Oktober – 2 November 1954

Perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia

III. Jakarta, 28 Oktober – 3 November 1978

Disepakati pula bahwa Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali setiap peringatan Hari Sumpah Pemuda.

IV. Jakarta, 21 -26 November 1983

Mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin.

V. Jakarta, 28 Oktober – 3 November 1983

Disusunnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

VI. Jakarta, 28 Oktober – 2 November 1993

Kongres mengusulkan agar Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.

VII. Jakarta, 26 – 30 Oktober 1998

Kongres itu mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa.

VIII. Jakarta, 14 – 17 Oktober 2003

Menetapkan bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa.

IX. Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008

2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa

X. Jakarta, 28 – 31 Oktober 2013

Menghasilkan 33 rekomendasi yang salah satunya menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, serta memberlakukan UKBI sebagai "paspor bahasa" bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

XI. Jakarta, 28 – 31 Oktober 2018

Menghasilkan 22 rekomendasi dan memberikan penghargaan kepada sejumlah pegiat bahasa Indonesia dan provinsi penerima penghargaan Adibahasa, serta meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan.

(Diambil dari berbagai sumber)





Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Gedung C Lantai 1
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
10270

• • • • • • • • • • • • • • • •
Telepon : 021-5703303, 57903020
Faksimile : 021-5733125
SMS : 0811976929
Surel : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : ult.kemdikbud.go.id

Kini Anda dapat mengakses
Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id



Dapat diakses
melalui PC, laptop,
smartphone



Selamat Hari Guru Nasional

25 November 2018

"Meningkatkan
Profesionalisme Guru
Menuju Pendidikan Abad 21"



#gurudihatiku
#guruabad21